

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penurunan suara dan jumlah kursi PDI Perjuangan di DKI Jakarta pada pemilu legislatif tahun 2024 disebabkan oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tidak dapat memprediksi hasil akhir pemilu legislatif. Adapun yang menyebabkan suara dan jumlah kursi PDI Perjuangan mengalami penurunan di DKI Jakarta dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu keanggotaan partai, kepemimpinan partai, dan sumber daya partai. Sebagai partai politik dengan basis kepemimpinan terpusat, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menerima dan melaksanakan arahan politik termasuk mengenai pemilu legislatif sesuai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini permasalahan nasional memiliki pengaruh terhadap permasalahan lokal atau daerah sehingga keduanya memiliki keterkaitan yang harus diselesaikan dari DPD dan DPP PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan menghadapi tantangan serius berupa perubahan langkah politik dari salah satu anggotanya sehingga memengaruhi citra partai di mata publik. Hal ini juga berdampak pada pergeseran dukungan yang beralih ke partai lain akibat dinamika internal partai. Berdasarkan dengan teori organisasi partai politik, ditemukan bahwa penurunan jumlah kursi PDI Perjuangan pada pemilu legislatif DKI Jakarta tahun 2024 dipengaruhi oleh situasi dan kondisi partai. Adapun faktor penyebab turunnya jumlah kursi ini dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu keanggotaan partai, kepemimpinan partai, dan sumber daya partai dengan masing-masing memiliki keterkaitan dan pengaruh dari internal partai. Pertama, keanggotaan partai di PDI Perjuangan ditemukan masalah antara anggota partai yang memiliki jabatan tinggi dengan partai sebagai partai pengusung. Anggota partai tersebut telah menunjukkan gestur mendekat kepada lawan politiknya sebelum masa pemilu 2024 dimulai dengan disertai perpindahan dukungan relawannya kepada lawan politik. Sebelum

masa pemilu tiba, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta juga melaksanakan sistem kaderisasi kepada seluruh anggotanya melalui Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan untuk mempersiapkan pendidikan politik ketika menduduki jabatan di parlemen. Adapun sekolah politik tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu Sekolah Partai Kader, Sekolah Partai Legislatif, dan Sekolah Partai Eksekutif. Akan tetapi, terbatasnya waktu sistem kaderisasi ini dinilai masih kurang maksimal untuk bisa memahami dan mempelajari strategi yang tepat untuk digunakan ketika kampanye.

Kedua, kepemimpinan PDI Perjuangan yang berpusat pada Ketua Umum Partai menjadikan penyelesaian masalah sesuai dengan arahan pusat meskipun dalam konteks tertentu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan pencalonan pada tingkat daerah. Ketua Umum melakukan pemecatan kepada 27 anggota PDI Perjuangan di mana satu anggotanya berasal dari DKI Jakarta dan tiga anggota berasal dari keluarga Jokowi, yaitu Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution. Pemecatan anggota partai terjadi akibat melanggar kode etik partai dengan memberikan dukungan kepada calon lain yang diusung oleh lawan politik. Ketika calon anggota legislatif turun ke masyarakat untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja, kehadiran politik uang menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Tingginya politik uang di DKI Jakarta pada pemilu 2024 disebabkan oleh tingginya ruang persaingan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi internal partai memengaruhi citra partai di publik dalam memilih dan memberikan dukungan suaranya. Ketiga, sumber daya partai menjadi poin penting dalam suatu organisasi partai, terlebih ketika masa kampanye pemilu telah tiba. Sumber daya finansial, logistik, dan manusia saling berkaitan satu sama lain yang mana jika sumber daya dimanfaatkan dengan baik dan maksimal akan memudahkan calon anggota legislatif terjun langsung membantu ke masyarakat. Akan tetapi, adanya penyalahgunaan sumber daya negara secara tidak langsung kepada suatu partai menyebabkan persaingan tidak setara antar partai politik yang berdampak pada pemilu legislatif. Dengan demikian, pemilu presiden memiliki dampak yang besar terhadap pemilu legislatif dikarenakan adanya *coattail effect*.

Kondisi ini menyebabkan lemahnya efektivitas strategi politik yang telah disusun PDI Perjuangan selama masa kampanye berlangsung. Faktor internal partai memengaruhi kondisi eksternal partai, begitu pula sebaliknya. PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu 2024 memiliki sikap percaya diri yang cukup tinggi karena pada pemilu sebelumnya berhasil merebut kemenangan dua kali berturut-turut, baik dalam pemilu eksekutif maupun legislatif. Kemenangan pada pemilu sebelumnya meyakinkan PDI Perjuangan bahwa basis dukungan relatif stabil karena kadernya Jokowi menduduki jabatan Presiden. Akan tetapi, pada faktanya Jokowi memiliki pandangan berbeda dengan PDI Perjuangan sehingga memengaruhi kondisi partai untuk dapat mencapai *hat trick* atau tiga kali menang di wilayah DKI Jakarta.

PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai massa secara historis mengandalkan kedekatan antara partai dan pemilih melalui identitas ideologis dan ikatan emosional sebagai sumber utama dukungan elektoral mengalami penurunan citranya dalam pemilu legislatif 2024. Penurunan perolehan jumlah suara PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif DPRD DKI Jakarta ini mencerminkan adanya perubahan preferensi pemilih dan pergeseran dukungan oleh simpatisan. Masyarakat merasa kecewa terhadap keputusan atau kebijakan pada periode sebelumnya sehingga berimbas pada hasil pemilu yang mengalami penurunan. Tidak hanya itu, dinamika politik yang terjadi di Jakarta juga berimplikasi langsung pada keputusan akhir pemilih dalam memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif maupun partai politik yang berkompetisi.

DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mengatasi permasalahan tersebut dengan langsung menelaah apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari strategi kampanye pemilu legislatif tahun 2024. DPD PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa seluruh tingkatan baik itu DPD, DPC, PAC, maupun ranting untuk selalu hadir untuk masyarakat sebagai garda terdepan dalam membantu kesejahteraan masyarakat sesuai dengan slogan “partainya wong cilik”. Calon anggota legislatif terpilih melakukan kegiatan *focus group discussion* (FGD) sebagai bentuk kehadiran nyata bagi mereka sehingga dapat memperbaiki jumlah suara dan kursi di pemilu selanjutnya.

## 5.2. Saran

Sebagai partai politik yang telah lama berkontribusi dalam perpolitikan Indonesia, PDI Perjuangan sudah seharusnya melakukan pembenahan dan peningkatan untuk mengatasi penurunan jumlah suara dan kursi pada pemilu legislatif khususnya di wilayah DKI Jakarta mendatang. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Sistem Kaderisasi

Sistem kaderisasi yang sudah ada di PDI Perjuangan harus diperkuat dengan pelaksanaan Sekolah Partai secara rutin, tidak hanya menjelang pemilu legislatif. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta diharapkan mampu memaksimalkan program ini kepada seluruh anggota partai yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik, komunikasi politik, kedisiplinan, dan kesiapan calon anggota legislatif memasuki arena kompetisi. Tidak hanya itu, PDI Perjuangan juga harus melakukan pembenahan pola rekrutmen kader dengan mementingkan kualitas dan kapasitas seseorang. Proses seleksi terhadap calon anggota partai dan calon anggota legislatif dilakukan secara terukur dan terbuka untuk menghasilkan kader yang kompeten sejalan dengan tujuan partai. Hal ini juga akan memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap PDI Perjuangan.

### 2. Evaluasi Pola Kepemimpinan Partai

Ketua Umum sebagai pemimpin tertinggi partai bersama dengan pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta perlu melakukan pembenahan terhadap kondisi internal partai. Perlu adanya tindakan tegas kepada anggota partai yang terbukti melanggar AD/ART partai, seperti melakukan pengkhianatan terhadap partai, kasus korupsi, ataupun pelanggaran lainnya yang menyebabkan citra partai di mata publik mengalami penurunan. PDI Perjuangan harus berani melakukan penegakan hukum dengan memberlakukan *punishment and reward*. Penyelesaian konflik internal juga harus dilakukan secara transparan sehingga kepercayaan publik dapat dikembalikan.

### 3. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya

Sumber daya partai yang tersedia diharapkan teroptimasifikasi dengan tepat agar berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Calon anggota legislatif secara adil memperoleh dukungan sumber daya dari PDI Perjuangan sesuai dengan kemampuan partai. Meskipun PDI Perjuangan telah melakukan tata kelola keuangan secara terstruktur, dibutuhkan transparansi kepada publik mengenai penggunaan dana kampanye untuk mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal. Selain itu, sumber daya yang tersedia oleh negara juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Partai, penyelenggara pemilu, dan juga masyarakat bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan sumber daya negara dan praktik politik uang untuk menciptakan suasana kompetisi pemilu yang lebih adil.

#### 4. Reorientasi Strategi Politik Partai

DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta perlu melakukan peninjauan kembali mengenai strategi politik yang digunakan dalam pemilu legislatif untuk tahun selanjutnya. Sebagai partai massa, PDI Perjuangan diharapkan dapat menyesuaikan kembali pendekatan kampanye kepada masyarakat yang saat ini memiliki karakter rasional dan kritis terhadap isu. Meskipun partai berbasis pemilih tradisional, optimalisasi strategi komunikasi politik berbasis digital diperlukan untuk menjangkau pemilih muda yang memiliki tingkat informasi yang cepat. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta juga diharapkan rutin melakukan diskusi bersama masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangan di luar agenda kampanye pemilu untuk memberikan dukungan ataupun solusi permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Dengan begitu kepercayaan publik terhadap kualitas partai akan semakin kuat.